

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan berkelanjutan sejatinya memiliki tujuan dalam memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan peluang generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus mencapai tiga unsur penting yang meliputi kesejahteraan ekonomi, kesetaraan social, dan kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan merupakan kondisi lingkungan yang berhubungan dengan kualitas hidup atau derajat pemenuhan kebutuhan dasar dalam kondisi lingkungan tersebut. Salah satu faktor kualitas lingkungan adalah terkelolanya sampah baik domestik, perkantoran, sekolah, dan lain-lain untuk memenuhi daya dukung lingkungan bagi kehidupan masyarakat.

Sampah menjadi suatu permasalahan yang krusial bagi suatu daerah karena akan berpotensi mengakibatkan menurunnya produktifitas yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dinyatakan bahwa, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah, artinya pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja melainkan juga masyarakat. Permasalahan sampah yang tidak ditangani dengan serius bisa dipastikan akan terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan laju meningkatnya pertumbuhan penduduk.

Paradigma pengelolaan sampah selama ini hanya dibebankan pada pemerintah, padahal pemerintah memiliki fungsi memberdayakan masyarakat, yang artinya masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri dalam proses pembangunan dengan melibatkan warganya untuk ikut berpartisipasi, suatu usaha dapat dikatakan berhasil sebagai pemberdayaan masyarakat, jika kelompok komunitas atau masyarakat juga dapat menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Pemerintah sebagai aparat negara selama ini sudah berperan dalam menjaga kebersihan dengan diterbitkannya Undang-undang, peraturan pemerintah,

dan Perda-Perda kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Di Indonesia sendiri data volume sampah setiap tahunnya mengalami kenaikan, salah satu faktor meningkatnya volume sampah karena semakin bertambahnya jumlah penduduk dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah. Permasalahan sampah dapat dijumpai di tiap-tiap daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Situbondo.

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu daerah yang padat penduduk dan daerah yang juga mengalami perkembangan pembangunan penduduk setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap meningkatnya volume sampah di Kota Santri ini. Hal ini dapat dilihat dari data volume sampah yang ada di Kabupaten Situbondo, berdasarkan data sampah dari tahun 2011 hingga 2017 yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa jumlah sampah secara global pada tahun 2011 berjumlah 8.060.716, pada tahun 2012 berjumlah 7.882.180, pada tahun 2013 berjumlah 10.211.720, pada tahun 2014 berjumlah 7.396.620, pada tahun 2015 berjumlah 8.792.100, pada tahun 2016 berjumlah 9.799.190, dan pada tahun 2017 data sampah yang ada berjumlah 9.009.945.

Kabupaten Situbondo merupakan suatu daerah yang memiliki motto sebagai Kota SANTRI, yang berarti Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapi dan Indah. Filosofi dari motto ini adalah keinginan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat Situbondo, agar Kabupaten Situbondo bersih dan tertib, baik dari segi Fisik maupun non fisik, serta dapat menjaga lingkungannya agar tetap sehat dan indah. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan Situbondo sebagai Kota Santri adalah dengan menciptakan kebersihan lingkungan terkait masalah persampahan yaitu dengan melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo.

Permasalahan sampah di Kabupaten Situbondo telah mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah setempat dengan berbagai upaya juga dilakukan oleh pihak pemerintah daerah untuk menyikapi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor

7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo, tidak hanya itu pemerintah daerah Kabupaen Situbondo juga mencanangkan berbagai program yang mana dengan adanya program-program tersebut, pengelolaan sampah diharapkan menjadi lebih positif dan bahkan menguntungkan serta diharapkan dapat memberdayakan masyarakatnya dengan ikut bergabung dan ikut membantu menjaga lingkungan disekitarnya. Tidak hanya dengan adanya program dan upaya dari pemerinah daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo juga menciptakan “sipesah” yaitu sistem informasi pengelolaan sampah, sistem ini merupakan langkah pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap peraturan yang ada untuk permasalahan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo. Dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Situbondo, tentu pemerintah daerah Situbondo khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo memiliki upaya dan strategi-strategi dalam memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan sampah, sehingga sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, bernilai, dan tentunya juga untuk menangani dan mengurangi volume sampah di Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan permasalahan yang ada di Kabupaten Situbondo terkait pengelolaan sampah yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, maka peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah (Di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana upaya dan Strategi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Situbondo dalam pengelolaan sampah khususnya dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah. Dengan demikian rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peran Pemerintah daerah, Swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo?

2. Bagaimana strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo dalam pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah di kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan tentang Peran Pemerintah daerah, Swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan tentang Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah di Kabupaten Situbondo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang positif bagi berbagai pihak, antara lain: pihak praktis, pihak teoritis, dan terutama bagi peneliti.

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang positif bagi kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat serta untuk menambah wacana ilmu pengetahuan berupa pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan bank sampah.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang positif dalam penerapan ilmu pemerintahan khususnya tentang Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah. Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi serta sebagai bahan perbandingan bagi penulis lain apabila ingin melakukan penelitian dengan topik atau permasalahan yang sama.

### **1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat menambah pengetahuan dan keterampilan saya di bidang penelitian. Selain itu mempermudah saya untuk mengetahui hasil yang sebenarnya berdasarkan fakta dari penelitian tersebut. Dan saya juga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.